BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kebijakan Kepala Madrasah

   a. Pengertian Kebijakan

Untuk meningkatkan suatu sekolah yang bermutu di perlukan suatu kebijakan yang tepat dengan membuat suatu program program sesuai dengan tujuan sekolah yaitu visi dan misi. Kebijakan kepala sekolah terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan kepala sekolah. Sebelum kita mengetahui makna dari kebijakan kepala sekolah terlebih dahulu kita harus mengetahui makna dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan adalah terjemahan dari kata *"wisdom"* yaitu suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang di kenakan pada sesorang atau kelompok orang tersebut tudak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain ia dapat pengeculian artinya wisdom atau kebijakan adalah suatu kearifan pihak yang menentukan kebijakan, dapat saja mengecualikan aturan yang baku kepada seseorang atau sekelompok orang, jika mereka tidak dapat dan tidak meungkin tadi, dengan kata lain dapat di kecualikan tetapi tidak melanggar aturan.[1]

Kamus besar bahasa indonesia mengemukakan bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran dan kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan

[1] Syafaruddin & Asrul, *Kepemimpinan Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Citapustaka Media, 2015), hal. 14

pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya untuk manajemen dalam mencapai sasaran.[2]

Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Menurut Gamage dan Pang dalam kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang laus untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangkah kerja bagi pelaksanaan program[3]

Adapun menurut peneliti, kebijakan adalah hasil keputusan-keputusan yang dibuat secara arif dan bijaksana oleh kepala sekolah atau madrasah dalam mengambil suatu keputusan baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat. Selain itu pengambilan keputusan atau kebijakan tidak bisa dipisahkan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu bagian terpenting dalam Manajemen. Tanpa adanya pengambilan keputusan atau kebijakan tidak ada kepemimpinan, maka manajemen tidak berfungsi sehingga untuk mencapai tujuan yang diinginkan tercapai dengan melangkah lebih maju ke masa depan.

---

[2] Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung, Alfabeta, 2009) h.94

[3] Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung, Alfabeta, 2009) h.94

b. Fungsi dan Tujuan Kebijakan

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau reskontruksi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan[4]

Fungsi analisis kebijakan dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian pokok.

1) Fungsi alokasi.Untuk melaksanakan fungsi penting ini analisis kebijakan harus mampu melibatkan diri didalam, atau paling tidak mempelajari tentang sistem, dan proses pembuatan kebijakan negara baik pada tingkat suprastruktur (*political*) maupun pada tingkatan sektoral (*teknichal*). Kajian makro ini pada dasarnya merupakan analisis hubungan timbal balik antara sistem pendidikan dengan sistem yang lebih besar. Agar pendidikan memiliki kesesuaian dengan bidang-bidang kehidupan
2) Fungsi inquiri, Fungsi inquiri dapat dilakukan jika seluruh atau sebagian agenda penelitian dan pengembangan sudah dilaksanakan dan mencapai hasilhasilnya. Dalam fungsi

[4] Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Yang Efektif,* (Jakarta: Rineka Cipta,2008), hlm.77-78

inquiri pelaksanaan analisis kebijakan berkaitan dengan pendekatan, metodologi, serta teknik-teknik analisis. Kajian metodologi dan substansial dalam rangka melaksanakan fungsi inquiri terdapat dua bentuk kajian metodologi atau substansial. Kajian metodologi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi para peneliti agar dicapai penyempurnaan dalam metodologi analisis dan penelitian dikemudian hari. Kajian substansial dimaksudkan untuk memperoleh sintesis dari berbagai kelompok jenis temuan penelitian dan pengembangan yang sudah ada agar diperoleh suatu usulan kebijakan yang lebih realistis berkaitan dengan isu-isu kebijakan yang sudah diidentifikasikan sebelumnya. Disamping itu, apakah suatu gagasan kebijakan itu relevan atau tidak dilihat dari kepentingan masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan[5].

3) Fungsi komunikasi, Fungsi komunikasi, yaitu fungsi yang dapat dilaksanakan jika analisis kebijakan menghasilkan berbagai gagasan atau usulan kebijakan yang benar-benar realistis. Tugas analisis kebijakan dalam hal ini adalah menyampaikan alternatif atau gagasan kebijakan tersebut kepada sumua pihak yang berhubungan agar diperoleh suatu umpan balik mengenai keabsahan gagasan-gagasan yang diusulkan agar menjadi kebijakan public. Oleh karena itu

[5] Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Yang Efektif,* (Jakarta: Rineka Cipta,2008), hlm.77-78

tugas para analis kebijakan adalah meyakinkan pihak-pihak tersebut khususnya yang menyangkut keuntungan, kelemahan, dan berbagai implikasinya yang mungkin timbul dari penerapan suatu gagasan kebijakan yang diusulkan

c. Komponen Kebijakan

Untuk membuat suatu kebijakan yang tepat di perlukan suatu cara yang tepat agar kebijakan yang di ambil oleh kepala seklah dapat berjalan dengan baik guna meningkatkan mutu pendidikan di suatu sekolah sesuai dengan tujuan yang telah di buat.

1) Perumusan Masalah, Perumusan Masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan pandangan pandangan yang bertentangan dan merancang kebijakan-kebijakan yang baru.
2) Peramalan, Peramalan (*forecasting*) adalah suatu prosedur untuk membuat informasi yang faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu
3) Rekomendasi, Rekomendasi kebijakan adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai sasarannya. Dalam rekomendasi kebijakan maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prakondisi untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.
4) Pemantauan, Pemantauan atau monitoring menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat kebijakan yang diambil sebelumnya. Pemantauan (*monitoring*) merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan public
5) Evaluasi, Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah dapat terselesaikan tetapi juga menyumbang pada

> klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yangmendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam kebijakan public[6]

Jadi dapat peneliti simpulkan dalam proses pembuatan kebijakan/analisis kebijakan maka harus memperhatikan lima komponen yaitu: perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan serta evaluasi. Kelima komponen tersebut saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lainnya, karena kelima komponen tersebut dapat berguna untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relefan dengan kebijakan dalam berbagai konteks pendidikan berjalan sesuai tujuan yang telah di harapkan.

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tanggung jawab kepala sekolah atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

d. Kepala Madrasah

Kepala Madrasah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran".[7]

---

[6] William N. Dunn, *Public Policy Analysis Pengantar Analisis Kebijakan Public*, (Yogyakarta: Gajah Mada,1999), hlm.226-230

[7] Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Kepala Madrasah dalam satuan pendidikan merupakan pemimpin. Ia mempunyai dua jabatan yang penting dalam melaksanakan proses pendidikan. Pertama Kepala Madrasah adalah pengelola pendidikan di Madrasah, dan kedua, kepala Madrasah adalah pemimpin formal pendidikan di Madrasah. Kepala Madrasah atas manajemen pendidikan mikro, yang berlangsung berkaitan dengan proses pembelajaran. Dan pada dasarnya pengelolaan madrasah menjadi tanggung jawab kepala Madrasah dan pendidik. Namun kemampuan kepala Madrasah dalam memimpin sistem sekolah sangat berpengaruh terselanggarakanya manajemen yang baik. Kepemimpinan kepala Madrsah seyogyanya dapat menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan bagi lahirnya iklim kerja dan hubungan antar manusia yang harmonis dan kondusif. Hal ini berarti kepala sekolah berperan bagi pengelolaan madrasah yang baik.[8]

Kemampuan kepala Madrasah merupakan faktor penentu pemberdayaan bagi guru dan peningkatan mutu proses dan produk pembelajaran. Kepala madrasah merupakan orang yang paling bertanggung jawab supaya guru dan staf di Madrasah dapat bekerja secara optimal. Kultur Madrasah dan kultur pembelajaran jugan dibangun oleh kepemimpinan kepala madrasah dalam lembaga pendidikan Islam dalam berinteraski dalam komunitasnya.

Untuk dapat menjadi kepala sekolah, seseorang harus memenuhi kualifikasi umum dan khusus sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan

---

[8] E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional : dalam Konteks Menyusun MBS dan KBK*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakaraya, 2005), h. 25

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah. Berikut ini adalah kualifikasi kepala SMP/MTs berdasarkan peraturan terserbut:

a. Kualifikasi Umum

1) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
2) Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
3) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing; dan
4) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

b. Kualifikasi Khusus

1) Berstatus sebagai guru SMP/MTs;
2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs; dan
3) Memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.[9]

Di samping harus memiliki kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, kepala sekolah juga diwajibkan memiliki beberapa kompetensi spesifik, yaitu:

[9] Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial. pembelajaran sekolah. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.[10]

Apa yang diungkapkan di atas menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan kepala sekolah, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. Disamping itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan budaya yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah juga cenderung bergerak maju semakin pesat, sehingga menuntut penguasaan secara professional.

Menyadari hal tersebut, setiap kepala sekolah di hadapkan pada tantangan untuk melaksanakan pengembangan pendidikan secara terarah, berencana, dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam kerangka inilah dirasakan perlunya peningkatan manajemen kepala sekolah secara professional untuk menyukseskan program-program pemerintah yang sedang digulirkan. Yakni otonomi daerah, desentralisasi dan sebagainya, yang kesemuanya ini menuntut peran aktif dan kinerja profesionalisme kepala sekolah.

Kepala sekolah harus memiliki strategi manajemen pendidikan secara utuh dan berorientasi kepada manajemen pendidikan secara utuh dan

[10] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar/menengah.

berorientasi kepada mutu. Startegi ini dikenal dengan manajemen mutu terpadu (MMT) atau *total quality management* (TQM).

Strategi ini merupakan usaha sistematis dan terkoordinasi untuk secara terus menerus memperbaiki mutu layanan, sehingga fokusnya di arahkan ke pelanggan dalam hal ini peserta didik, orang tua peserta didik, pemakai lulusan, guru, karyawan, pemerintah dan masyarakat.

Untuk itu, seorang kepala sekolah harus memiliki kemampuan yang berhubungan dengan administrasi sekolah yang meliputi

1. Kemampuan dalam bidang teknis pendidikan dan pengajaran
2. Kemampuan dalam bidang tata usaha sekolah
3. Kemampuan dalam pengorganisasian
4. Kemampuan dalam perencanaan. Berbagai pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Kemampuan dalam bidang pengelolaan keuangan[11]

e. Langkah-langkah Kebijakan Kepala Madrasah dalam Pendidikan

Dalam suatu kebijakan pendidikan terdapat tiga tahap kebijakan yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi. kepala sekolah sebagai petugas yang profesional di tuntut untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi dari kebijakan pendidikan tersebut adapu tiga tahap kebijakan sebagai berikut :

[11] A. Ghozali, et.al., *Administrasi Sekolah,* (Jakarta: Cahaya Budi , 2012), 37.

1. Formulasi kebijakan, Formulasi adalah perumusan atau pembuatan. Jadi, formulasi kebijakan adalah pembuatan /perumusan suatu kebijakan dalam pendidikan. Berikut adalah tahap tahap dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan:
   a) Penyusunan agenda,yakni disini menempatkan masalah pada agendapendidikan.
   b) Formulasi kebijakan, yakni merumuskan alternatif kebijakan untukmengatasi masalah.
   c) Adopsi kebijakan,yakni kebijakan alternatif tersebut di adopsi /diambil untuk sosulsi dalam menyelesaikan masalah tersebut.
   d) Implementasi kebijakan,yakni kebijakan yang telah diambil di laksanakan dalam pedidikan.
   e) Penilaian kebijakan,yakni tahap ini tahap penelitian dlam pembuatan kebijakan dalam pencapaian tujuan dalam kebijakan pendidikan.[48]
   f) Dalam pembuatan kebijakan mengandung beberapa isi penting yang di jadikan sebagai pedoman tindakan sesuai yang di rencanakan.

2. Implementasi Kebijakan, Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. dijelaskan oleh Putt dan Springer, Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktifitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam pembutan kebijakan terwujud ke dalam praktek atau realisasinya.Dan untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan langkah yaitu: *Pertama* ,secara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program program pendidikan. *Kedua*,dapat melalui kebijakan derivat (turunan) dari kebijakan pendidikan nasional tersebut.

2. Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu Pendidikan.

Mutu berarti "Karat" baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf/derajat (kepandaian, kecerdasan) Dalam kamus besar Bahasa Indonesia [12] Pendidikan adalah perbuatan mendidik jadi secara etimologi mutu pendidikan adalah kualitas perbuatan mendidik, perbuatan disini adalah interaksi antara guru dan murid dalam proses belajar mengajar dikelas.

[12] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 604

Mutu diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan dan upaya perubahan ke arah perbaikan terus menerus sehingga dikenal dengan Q =Match (Quality =*Meets Agreed Terms and Changes*).[13]

Mutu adalah kemampuan (ability) yang dimiliki suatu jasa yang dapat memenuhi kebutuhan, kepuasan (satisfaction), pelanggan (customers) dalam pendidikan. Customors dikelompokan menjadi dua yaitu internal customer dan eksternal customer. Interneal customer yaitu siswa dan customer eksternal yaitu masyarakat dan dunia industri.[14] mutu tidak bisa berdiri sendiri melainkan perlu adanya hal-hal atau faktor yang dapat membantu dalam pencapaian dan pemeliharaannya. Dalam hal ini maka penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) sangat dibutuhkan.

Menurut Sudrajad pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu mengahsilkan lulusan yang memilki kemampuan dan kompetensi, baik kompetensi akademik atupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia yang keseluruhan merupakan kecakapan hidup *(Life Skill*) selain itu menghasilkan manusia yang seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia yang pribadi integral *(integrated personality)* yaitu mereka yang mampu mengintegralkan iman, ilmu dan amal.[15]

Benjamin S Bloom mengemukakan mutu pendidikan yaitu :

---

[13] Vincent Gasperz, *Total Quality Manajemen,* (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 5

[14] Nanang Fatah. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.*(Bandung :PT Remaja Rosdakarya.2013) .2.

[15] Hari Sudrajat, *Manajemen Peningkatan mutu berbasis sekolah; Peningkatan mutu Pendidikan melalui Implementasi KBK* (Bandung: Cipta Lekas Grafika, 2005), h.112

“ Quality of intruction as though it deals with one ore more learning tasks defined in a parcitular way, we ware maintaining that quality of intruction on a parcitular learning task (defenid in a parcitular way) cannot overcome the lack of the prerequisite cognitive entery behaviors for that learning task”[16]

Mutu salah satu konsep yang membahas satu dari banyak pembelajaran yang didefinisikan sebagai

Berdasakan konsep diatas mutu pendidikan itu adalah kualitas penyelenggaraan pendidikan yang meliputi : kesiapan siswa, ketersediaan tenaga pengajar, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, relevansi pendidikan dengan kebutuhan, susana lingkungan dan iklim sekolah. Mutu pendidikan yang dimaksud disini adalah kemampuan lembaga pendidikan islam dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Mutu pendidikan tidak terlepas dari seperangkat pelaksanaan pendidikan memiliki lingkup kegiatan langsung berkaitan dengan proses pembalajaran. Dengan kata lain mutu pendidikan disini adalah tingkat/taraf derajat kemampuan dalam pengelolaan secara operasional dan efesien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan Madrasah dan yayasan sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen-komponen tersebut menurut norma dan standar yang berlaku

Menurut Departemen pendidikan Nasional, Derektorat Jendral Pendidikan dasar dan Menengah menyatakan bahwa secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang

---

[16] Banjamin Bloom S, *Taxonomy of Educational Objectives Cognitive Domain,* (Book I, Newyork: Logman, 2002), 109-110.

menunjukan kemampuannnya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup, *input, proses dan output* pendidikan.[17] Peneliti dapat menjelaskan bahwa input pendidikan segala sesuatu yang tersedia kerna dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input sumberdaya manusia (kepala Madrasah, guru, BP, karyawan dan siswa dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan dan lain sebagainya). Input harapan-harapan berapa visi dan misi dan tujuan madrasah. Selanjutnya proses segala pengelolaan kelembagaan, program, proses pembelajaran dan evaluasi. Dan output prestasi sekolah yang dihasilkan dari prilaku Madrasah dari beberapa prestasi akademik dan non akademik. Mutu madrasah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusanya tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan).[18] Jadi mutu bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri melainkan terkait dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dimana kebutuhan masyarakat dan perubahan yang terjadi

---

[17] Depdiknas, *Manajemen Penjaminan mutu berbasis Madrasah, Buku I Konsep dan Pelaksana*, (Jakarta : 2001), 24

[18] Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam konteks Mensukseskan MBS dan KBK*, (Bandung : (PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h.226

bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pendidikan juga harus bias menyeimbangi perubahan yang terjadi secara cepat dan bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan yang bermutu juga diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang bukan hanya menghasilkan prestasi akademik tetapi juga memilki prestasi non Akademik, mampu menjadi pelopor perubahan dan mampu dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada, baik untuk masa sekarang, akan datang dan juga memiliki rasa kebangsaan dan keindonesiaan yang tinggi.

Dalam upaya pencapaian mutu pendidikan yang baik diperlukan adanya kesungguhan dari para pengelola pendidikan agar pendidikan yang dikelola mampu mengembangkan dan mencetak lulusan Madrasah yang berkualitas yang menguasi kecakapan hidup yaitu kecakapan personal *(personal skill)*, sosial *(sosial skill)* dan kecakapan khsusus *(spesific life skill)* sehingga mampu mampu memenuhi kebutuhan *stekholder* melalui tindakan operasional dalam proses pendidikan, tentunya dengan sumber daya yang berkualitas, manajemen yang efektif dan mapan.

b. Konsep Dasar Total Quality Manajemen (TQM)

Akhlak menjadi hal yang penting pada perjalanan hidup manusia. Sebab akhlak memberi norma-norma baik dan buruknya menentukan kualitas pribadi manusia.

Perwujudan tujuan tersebut maka sudah barang tentu memerlukan perangkat operasional yang berkualitas yang selalu dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat, melalui peningkatan berbagai komponen seperti pengembangan kurikulum dan metodologi, pemenuhan dan peningkatan mutu kemampuan tenaga pendidik, kependidikan serta sarana dan prasaran dan lain sebagainya. Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam harus senantiasa bertitik tolak dari rumusan tujuan tersebut sehingga keluaran lembaga ini mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar tujuan Madrasah tercapai :

a) Pendidikan harus merupakan usaha sadar yang harus dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa atau siapa saja yang bertanggung jawab dalam rangka membimbing dan mempersiapkan anak dengan atas nama Allah SWT serta bertanggung jawab kepadanya
b) Bahwa yang dibimbing merupakan generasi muda dengan seluruh kelengkapan dasar dan potensi-potensi fitrahnya agar tumbuh kembang secara bertahap, yaitu kekhalifahan dengan penuh tanggung jawab kepada Allah SWT
c) Berpedoman kepada Al Qur’an, sehingga secara konseptual dan praktis, maka metode, pelaksanaan, materi, evaluasi dan

alat-alatnya dapat dijabarkan dan dikembangkan dari Al Qur'an.[19]

Total Quality Management (TQM) merupakan suatu sistem manajemen yang berfokus pada orang yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan *stakeholder* pada biaya sesungguhnya secara berkelanjutan dan terus menerus.[20] Dan inti dari strategi ini usaha sistematis dan terkoordinasi untuk secara terus menerus memperbaiki pelayanan, sehingga fokus diarahkan ke *stakeholder* yakni peserta didik, orang tua, guru, karyawan, pemakai lulusan, pemerintah dan masyarakat.

TQM merupakan budaya peningkatan mutu pendidikan secara terus menerus, fokus pada *stakeholder* sekolah demi kepuasan jangka panjangnya dan partisipasi warga sekolah, keluarga, masyarakat dan pemerintah.[21] TQM pendidikan merupakan filosofi perbaikan terus menerus lembaga pendidikan menyediakan seperangkat sarana atau alat untuk memenuhi bahkan melampaui kebutuhan, keinginan, harapan *stakeholder* saat ini dan dimasa mendatang. Organisasi pendidikan misalnya, yang menerapkan TQM memandang kualitas dari sudut pandang *stakeholder*. Alasannya karena *stakeholder*-lah sebagai pihak

---

[19] Zulkarnain, *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 32

[20] E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyesuaikan MBS dan KBK*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 224

[21] Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Teori Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 459

terakhir yang menilai kualitas dan tanpa *stakeholder* maka suatu organisasi tidak akan ada.[22]

Pendidikan konsentrasi *Total Quality Management* (Manajemen mutu terpadu) adalah pada :

a) Melibatkan *supplier* dan *Costumer* atau *Stakeholder*

b) Fokus terhadap produk dan proses

c) Disampaikan melalui *teamwork*

d) Bertujuan untuk perbaikan terus menerus

e) Bertanggung jawab untuk seluruh pekerja[23]

c. Prinsip-Prinsip Mutu Pendidikan.

Edrward Deming mengemukakan 14 prinsip yang mengembangakan apa yang butuhkan Madrasah untuk mengembangkan budaya mutu, prinsip itu adalah sebagai berikut :

1) Menciptakan konsistensi tujuan, yaitu memperbaiki layanan dan siswa dimaksudkan untuk menjadikan madrasah yang kompetitif dan berkelas
2) Mengadopsi folosofi mutu total, setiap orang harus mengikuti prinsip-prinsip mutu
3) Mengurangi kebutuhan kemajuan dan inspeksi yang berbasis inspeksi yang berbasis produski masal dilakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendidikan. Memberikan lingkungan belajar yang menghasilkan kinerja siswa yang bermutu
4) Menilai bisnis Madrasah dengan cara baru, nilailah bisnis madrasah dengan meminimalkan biaya total pendidikan
5) Menilai mutu produktivitas serta mengurangi biaya, memperbaiki mutu dan produktivitas sehingga mengurangi biaya dengan mengembangkan proses “rencan/periksa/ubah
6) Belajar sepanjang hayat, mutu diawali dan diakhiri dengan latihan, bila ada mengharapkan orang mengubah cara kerja

[22] Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi,* (Jakarta : Grasindo, 2003), h. 79

[23] Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi,* h. 89

mereka, ada mesti memberikan mereka perangkat yang diperlukan untuk mengubah proses kerja mereka

7) Kepemimpinan dalam pendidikan, merupakan tanggung jawab manajemen untuk memberikan arahan. Para manager dalam pendidikan mesti mengembangkan visi dan misi harus diketahui dan didukung oleh para guru, orang tua dan komunitas
8) Mengeliminasi rasa takut, ciptakan lingkungan yang akan mendorong orang untuk bebas berbicara
9) Mengeliminasi hambatan keberhasilan, manajemen bertanggung jawab dalam mengilangkan hambatan yang menghalangi orang mencapai dan menjalankan keberhasilan
10) Menciptakan budaya mutu, ciptakanlah budaya mutu yang mengembangkan tanggung jawab setiap orang
11) Perbaiki proses, tidak adal proses yang sempurna karena itu carilah cara yang terbaik, terapkan tanpa pandang bulu
12) Membantu siswa berhasil, hilangkan rintangan yang merampas hak siswa, guru dan administrator untu memiliki rasa bangga dengan hasil karyanya
13) Komitmen, manajemen harus memilki komitmen terhadap buday mutu
14) Tanggung jawab, berikan setiap orang di Madrasah untuk bekerja menyelesaikan transformasi mutu.[24]

d. Kriteria dan Syarat Mutu Pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dibangun atas landasan filosofis yang mengandung konsep dan inti yang berkaitan satu sama lain. Landasan tersebut dibuat dibuat umpan balik dan disusun berdasarkan nilai nilai yang menjadi keberhasilan sistem penjaminan mutu pendidikan. Nilai nilai filosofis atau kriteria dalam persepektif penjaminan mutu pendidikan menjadi landasan dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu nilai kriteria itu menurut Grand Desain yaitu:

[24] Jeromi S Arcaro, *Pendidikan Berbasis mutu, Prinsip-Prinsip perumusan dan tata langkah penerapan* (Yogyakarta :Pustaka pelajar, 2006), h 85-89

1) Kepemimpinan yang visioner (*Visionary Leadership*)
2) Pembelajaran berfokus pada pendidikan (*Learning Centered Education*)
3) Pembelajaran perorangan dan organisasi (*Organizational and Personal Learning*)
4) Menghargai tenaga pendidik, staf dan mitra kerja (*Valuing Faculty, staff dan Partners*)
5) Kegesitan (*Agility*)
6) Fokus pada masa depan
7) Mengelola inovasi
8) Manajemen berdasarkan fakta
9) Pertanggungjawaban sosial
10) Persepektif keislaman.[25]

Penjaminan mutu diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program satuan pendidikan. Yang menjadi esensi akreditasi adalah sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transsparan dengan menggunakan instrument dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan mencangkupdelapan standar nasional yaitu:

a) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kompetensi merupakan seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Standar Kompetensi Lulusan ini adalah kriteria mengenai kualifikasi

[25] Nanang Fatah. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*..(Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013). 4.

kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

b) Standar Isi, Standar isi yaitu kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi mencangkup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi

c) Standar Proses, Standar proses yaitu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan

d) Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan, Standar Pendidik dan Kependidikan yaitu kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani. Kompetensi yang harus dimilki seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial.

e) Standar Sarana dan Prasarana, Standar sarana dan prasarana yaitu kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, perpustakaan, labolatorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses

pembelajaran, termasuk pengunaan teknologi informasi dan komunikasi.

f) Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan dalam satu tahun. Biaya pendidikan terdiri dari biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal.

g) Standar Pengelolaan, Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/ kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

h) Standar Penilaian, Standar Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik. Yang mana penilaian hasil pembelajaran disini pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan Kompetensi Dasar yang dimiliki. Dan salah satu dari penilaian ini yaitu dengan diberlakukannya ujian nasional untuk mengukur sejauh mana kemampuan atau kompetensi anak yang didapat selama tiga tahun.[26]

Delapan standar nasional pada ahirnya akan bermuara pada suatu tujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka

[26] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan.* (Jakarta: Sinar Grafik,2013). 2

mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pemerintah mewajibkan setiap satuan pendidikan, baik formal maupun non formal untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana serta memilki target dan kerangka waktu yang jelas agar dapat memenuhi atau bahkan melampaui standar nasional pendidikan.

Unsur pendidikan yang perlu diperhatikan agar tujuan Madrasah bisa tercapai dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan:

a. Pendidikan harus merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh irang tua atau orang dewasa atau siapa saja yang bertanggung jawab dalam rangka membimbing dan mempersiapkan anak dengan dan atas nama Allah SWT serta bertanggung jawab kepada-Nya.
b. Bahwa yang dibimbing merupakan generasi muda dengan seluruh kelengkapan dasar dan potensi-potensi fitrahnya, agar tumbuh kembang secara bertahap ke arah kesempurnaan
c. Tujuan pembimbingan dalam pendidikan adalah agar anak nantinya mampu melakasanakan tugas-tugas hidup, yaitu kekhalifahan dengan penuh tanggung jawab kepada Allah SWT
d. Berpedoman pada Al-Qur’an, sehingga secara konseptual maupun praktis, maka metode, pelaksanaan, materi, evaluasi,

dan alat-alatnya dapat dijabarkan dan dikembangkan dari Al-Qur'an.[27]

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan.

Berbagai usaha telah dilakukaan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan komptenesi tenaga pendidik, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Dan meningkatkan mutu pendidikan Madrasah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukan peningkatan mutu yang berarti, sedangkan Madrasah terutama di Kota-kota, menunjukan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.

Keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan akan menjadi agenda utama semua birokrasi pendidikan, semua komponen kemadrasahan, semua orang tua dan wali murid, serta pihak-pihak lainya yang memilki jaringan langsung atau tidak dalam dunia pendidikan. Mutu pendidikan sangat ditentukan oleh banyak pihak, pemerintah, masyarakat, sekolah, orang tua dan siswa itu sendiri.

Menurut Maslikhah mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan mutu pendidikan yaitu :

1. Fungsi dan tujuan pendidikan yang kurang melekat pada pelaksana dan pelaksanaan pendidikan

[27] Zulkarnain, *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h.32

2. Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif tidak dijadikan prinsip yang menjunjung tinggi
3. Masyarakat seringkali diberlakukan sebagai komunitas untuk melegalkan sebuah kebijakan pelaksana pendidikan, dan bukan sebagai pelaku untuk memberdayakan madrasahnya
4. Evaluasi pendidikan sering dibelokan dengan kepentingan tertentu.[28]

Faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah :

1. Faktor tujuan, untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka faktor tujuan perlu diperhatikan. Sebab mutu lembaga pendidikan yang berjalan tanpa berpegang pada tujuan akan sulit mencapai apa yang harapkan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam harus berpegang teguh pada tujuan sehingga mampu menghasilkan output yang berkualitas, dengan kata lain faktor tujuan merupakan arah yang harus dicapai oleh instansi lembaga pendidikan Islam melalui tindakan-tindakan operasional.
2. Faktor guru, guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus benar-benar membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mempengaruhi siswanya. Guru harus berpandangan luas tentunya juga mempunyai empat kompetensi dasar yang harus dikuasai yaitu :pedagogik, sosial, pribadi dan profesional. Guru merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya peningkatan

[28] Maslikhah, *Pendidikan Multikultural, Rekontruksi Pendidikan berbasis kebangsaan,* (Salatiga: STAIN Salatiga, 2007) h. 889

mutu pendidikan, karena gurulah yang merupakan penggerak utama dalam melaksanakan kegiatan.

Oleh karena itu peranya yang begitu penting dalam peningkatan mutu pendidikan maka kualitas guru harus ditingkatkan yaitu dengan cara : (1). Meningkatkan guru melalui penataran, workshop, tugas untuk belajar dsb, (2). Mengadakan musyawarah antar guru dan semua warga madrasah dalam memecahkan masalah mutu pendidikan, (3). Mengaktifkan guru melalui pemantau melalui proses pembalajaran, (4). Mengadakan studi perbandingan dengan madrasah-madrasah yang sudah maju dengan harapan dapat memberi masukan yang berkaitan dengan upaya mutu pendidikan

3. Faktor siswa, anak didik merupakan objek pendidikan, sehingga mutu pendidikan yang akan dicapai tidak akan lepas dengan ketergantungan terhadap kondisi fisik tingkah laku dan minat bakat dari anak didik.
4. Faktor Alat, yang dimaksud dengan alat pendidikan yaitu segala usaha atau tindakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu keberadaan alat pendidikan sangat penting dalam suatu pembelajaran seperti sarana dan prasaran serta kurikulum
5. Faktor masyarakat/lingkungan, kemajuan pendidikan sedikit banyak dipengaruhi oleh masyarakat termasuk orang tua siswa,

karena tanpa adanya bantuan dan kesadaran dari masyarakat tentunya akan sulit untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan.[29]

Mutu tidak terjadi begitu saja, ia harus direncanakan. Mutu harus menjadi bagian penting dari strategi Madrasah, dan harus didekati secara sistematis dengan proses perencanaan strategis. Pernencanaan strategis merupakan salah satu bagian penting dalam *Total Quality Manajemen* (TQM)

B. Penelitian yang Relevan

Desi Puspita Sari Judul Skripsi "*Kontribusi gaya Kepimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Berprestasi guru Terhadap Mutu Pendidikan di Gugus Rama 2 UPT disdikpora Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara*, Skripsi Studi Manajemen IKIP PGRI Semarang.[30] Penelitian ini dilakukan terhadap Pelaksana Teknis UPTD Kecamatan Jepara, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap mutu pendidikan, motivasi berprestasi berpengaruh terhadap mutu pendidikan sebesar 18%. Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti gaya kepemimpinan, Program Manajemen pendidikan islam, variabel mutu pendidikan, tiga variabel yang diteliti, penelitian kuantitatif dengan metode survay, mengambil sampel dari populasi, teknik analisis data menggunakan

---

[29] Zahra Idris dan Lisma Jamal, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta : PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992), h. 28

[30] Desi Puspita Sari Judul Skripsi "*Kontribusi gaya Kepimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Berprestasi guru Terhadap Mutu Pendidikan di Gugus Rama 2 UPT disdikpora Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara*, Pascasarjana Program Studi Manajemen IKIP PGRI Semarang

statistik deskriptif. Selanjutnya perbadaannya yaitu : variabel dari teori mitivasi berprestasi, subjeknya semua guru di UPTD Dinas pendiikan.

Agustina, Judul Skripsi, *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Iklim Sekolah dan Kinerja Guru Terhadap Mutu Pendidikan di SMPN Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*. Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNILA 2016[31]. Persamaan dengan penelitian ini adalah Mutu pendidikan, mengambil sampel dari populasi, analisis menggunakan statistik deskriptif. Selanjutnya perbedaanya yaitu : variabel kepemimpinan kepada sekolah dan, mengambil objek penelitian 5 sekolah.

Penelitian ini menghasilkan bahwa Iklim sekolah berpengaruh langsung terhadap mutu pendidikan, hal ini bermakna bahwa apabila iklim sekolah dikembangkan menjadi lebih baik dan kondusif maka mutu pendidikan juga akan mengalami peningkatan, desain penelitian ini menggunakan metode survay untuk mengeksplorasi iklim kerja yang ada. Teknik rendom dalam menggunakan sampelnya dan data didapat menggunakan quisioner

Siti Rohiman, Judul Skripsi : *Pengaruh Kompetensi, Kompensasi, Disiplin Kerja Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Guru SMA Islamic Village Karawaci Tangerang,* Program Pasca Sarjana Universitas Esa Unggul

[31] Agustina, Judul Skripsi, *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Iklim Sekolah dan Kinerja Guru Terhadap Mutu Pendidikan di SMPN Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*. Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNILA 2016

2013.[32] Persamaan dengan penelitian ini yaitu : membahas tentang Disiplin guru, mengambi sampel dari populasi. Selanjutnya perbedaanya yaitu : Magister Manajemen sumber daya manusia, Variabel kompetensi, dan teknik analisis data menggunakan SPSS vers 16.0

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskriftipkan, menganalisis dan mengetahui pengaruh paling dominan dari kompetensi, kompensasi, disiplin kerja, terhadap kinerja dan kepuasan kerja. Sample berjumlah 40 responden melalui metode nonprobabilitas sampling. Temuan dalam penelitian ini yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja dengan nilai beta 0,377 dan kompensasi merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja dengan nilai beta 0,738.

C. Kerangka Pemikiran

Berbagai usaha telah dilakukaan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan komptenesi tenaga pendidik, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Dan meningkatkan mutu pendidikan Madrasah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukan peningkatan mutu yang berarti, sedangkan Madrasah terutama di Kota-kota, menunjukan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.

---

[32] Siti Rohiman, Judul Skripsi : *Pengaruh Kompetensi, Kompensasi, Disiplin Kerja Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Guru SMA Islamic Village Karawaci Tangerang*, Program Pasca Sarjana Universitas Esa Unggul 2013

Keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan akan menjadi agenda utama semua birokrasi pendidikan, semua komponen kemadrasahan, semua orang tua dan wali murid, serta pihak-pihak lainya yang memilki jaringan langsung atau tidak dalam dunia pendidikan. Mutu pendidikan sangat ditentukan oleh banyak pihak, pemerintah, masyarakat, sekolah, orang tua dan siswa itu sendiri.

Menurut Maslikhah mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan mutu pendidikan yaitu :

1. Fungsi dan tujuan pendidikan yang kurang melekat pada pelaksana dan pelaksanaan pendidikan
2. Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif tidak dijadikan prinsip yang menjunjung tinggi
3. Masyarakat seringkali diberlakukan sebagai komunitas untuk melegalkan sebuah kebijakan pelaksana pendidikan, dan bukan sebagai pelaku untuk memberdayakan madrasahnya
4. Evaluasi pendidikan sering dibelokan dengan kepentingan tertentu.[33]

Faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah :

1. Faktor tujuan, untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka faktor tujuan perlu diperhatikan. Sebab mutu lembaga pendidikan yang berjalan tanpa berpegang pada tujuan akan sulit mencapai apa yang harapkan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam harus berpegang teguh pada tujuan sehingga mampu menghasilkan output yang berkualitas, dengan kata lain faktor tujuan merupakan arah yang harus dicapai oleh instansi lembaga pendidikan Islam melalui tindakan-tindakan operasional.

---

[33] Maslikhah, *Pendidikan Multikultural, Rekontruksi Pendidikan berbasis kebangsaan,* (Salatiga: STAIN Salatiga, 2007) h. 889

2. Faktor guru, guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus benar-benar membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mempengaruhi siswanya. Guru harus berpandangan luas tentunya juga mempunyai empat kompetensi dasar yang harus dikuasai yaitu :pedagogik, sosial, pribadi dan profesional. Guru merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, karena gurulah yang merupakan penggerak utama dalam melaksanakan kegiatan.

   Oleh karena itu peranya yang begitu penting dalam peningkatan mutu pendidikan maka kualitas guru harus ditingkatkan yaitu dengan cara : (1). Meningkatkan guru melalui penataran, workshop, tugas untuk belajar dsb, (2). Mengadakan musyawarah antar guru dan semua warga madrasah dalam memecahkan masalah mutu pendidikan, (3). Mengaktifkan guru melalui pemantau melalui proses pembalajaran, (4). Mengadakan studi perbandingan dengan madrasah-madrasah yang sudah maju dengan harapan dapat memberi masukan yang berkaitan dengan upaya mutu pendidikan
3. Faktor siswa, anak didik merupakan objek pendidikan, sehingga mutu pendidikan yang akan dicapai tidak akan lepas dengan ketergantungan terhadap kondisi fisik tingkah laku dan minat bakat dari anak didik.
4. Faktor Alat, yang dimaksud dengan alat pendidikan yaitu segala usaha atau tindakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh

karena itu keberadaan alat pendidikan sangat penting dalam suatu pembelajaran seperti sarana dan prasaran serta kurikulum

5. Faktor masyarakat/lingkungan, kemajuan pendidikan sedikit banyak dipengaruhi oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, karena tanpa adanya bantuan dan kesadaran dari masyarakat tentunya akan sulit untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan.[34]

Mutu tidak terjadi begitu saja, ia harus direncanakan. Mutu harus menjadi bagian penting dari strategi Madrasah, dan harus didekati secara sistematis dengan proses perencanaan strategis. Pernencanaan strategis merupakan salah satu bagian penting dalam *Total Quality Manajemen* (TQM)

[34] Zahra Idris dan Lisma Jamal, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta : PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992), h. 28